

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	75,67	76,31	0,85
2	Angka Kemiskinan (September)	6,36	6,3	-0,94
3	Angka Pengangguran (Agustus)	3,7	4,16	12,43
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,52	4,79	36,08
5	Pendapatan per Kapita	165,35	176,385	6,67
6	Ketimpangan Pendapatan (September)	0,306	0,304	-0,65

Sumber data : BPS Provinsi Riau Tahun 2026

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar adalah gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, antara lain :

1. URUSAN PENDIDIKAN

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	99,07 %	87,88 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	73,56 %	77,30 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp 2.886.630.726.867,00. Dengan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terjadi perubahan data siswa pada tahun ajaran baru 2025/2026 sehingga menyebabkan perubahan data warga yang terlayani sehingga akan mempengaruhi nilai capaian.
2. Anggaran tahun 2025 direalokasikan untuk "Tunda Bayar Tahun 2024" sebesar Rp. 136.021.409.358,81. Dengan adanya realokasi untuk tunda bayar maka dilakukan rasionalisasi anggaran tahun 2025.
3. Permasalahan Terkait Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan :
 - a. Akses Geografis yang Sulit khususnya Daerah pesisir;
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;

- c. Kurangnya Program Pendidikan Alternatif yang Relevan;
- d. Minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Beberapa Daerah.

2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,2217	1,19
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi	100 %	100 %
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	100 %
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100 %	52,16 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp. 1.209.685.412.336,47 Dengan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tidak optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran
2. Belanja modal tidak dapat dilaksanakan karena fokus ke tunda bayar.
3. Belum ada panduan teknis terpadu dalam penanggulangan bencana yang terintegrasi antar-OPD pemangku SPM yang terkait.
4. Belum ada koordinator secara teknis, dan terpadu antar-OPD pemangku SPM dalam penggunaan dan pemanfaatan data dukung sampai ke desa/kelurahan lokasi berisiko dan rawan bencana dari Tim SPM Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota yang sudah menunjukkan kriteria KLB tidak mengeluarkan Penetapan SK KLB dikarenakan pembiayaan pengobatan pada saat kasus KLB tidak di-cover oleh BPJS, sedangkan Pemkab/Kota tidak memiliki anggaran untuk mencover pembiayaan kesehatan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	8,57	0,57
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemnafaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Yang sudah di terbitkan di Provinsi	-	0 (Belum ada KKPR kewenangan Provinsi yang diajukan oleh masyarakat pada tahun 2025)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,246	5,38
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25,10	100
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Sudah dilakukan study kelayakan	Belum dapat melakukan perhitungan study kelayakan
6	Rasio kemantapan jalan	66,64	62,78
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	51,866	48,43

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp.552.586.616.022,14 Dengan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan penyelesaian tunda bayar tahun 2024;
2. Adanya penambahan PPPK sehingga minimnya Anggaran yang ada;
3. Belum dilakukannya penyesuaian target akibat pergeseran anggaran dan penambahan anggaran pada APBDP.

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0% (Tidak adanya rumah tangga korban bencana yang tertangani pada tahun 2025)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak Adanya Rumah Tangga yang terkena Relokasi Program Pemerintah pada Tahun 2024	0% (Tidak adanya rumah tangga yang terkena relokasi program provinsi pemerintah pada tahun 2025)
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	43,47	0% (Tidak adanya pelaksanaan luasan Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2025 karena adanya rasionalisasi anggaran untuk menyelesaikan tunda bayar Tahun 2024)

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp.111.446.063.924,00. Dengan Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Adanya rasionalisasi dalam rangka efisiensi Anggaran sedikit banyak turut memengaruhi realisasi keuangan.

5. URUSAN KETENTERAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %	100 %
2	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
4	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100 %
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %
6	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp. 42.477.876.368,00. Dengan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan penyelesaian tunda bayar tahun 2024.
2. Adanya kebijakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak PNS 153 orang dan PPPK 304 orang per bulan dengan persentase 268,82%.

6. URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp. 60.318.578.958,32 . Dengan Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Adanya rasionalisasi dalam rangka efisiensi Anggaran sedikit banyak turut memengaruhi realisasi keuangan.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Provinsi Riau berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,4778** dan status kinerja **Tinggi**.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 Berdasarkan Laporan Nomor 25.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (LRA Sesudah Reviu Inspektorat) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2025 mencapai sebesar Rp.9.472.594.918.254,00 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 mencapai Rp.9.472.594.918.254,00 serta Realisasi Pembiayaan Daerah Rp.21.062.420.907,48

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah serta Pembiayaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.252.843.115.951,49	5.200.915.848.254,00	81,77
Pendapatan Pajak Daerah	3.470.375.711.564,01	3.762.826.296.737,00	92,23
Pendapatan Retribusi Daerah	13.044.592.042,00	12.501.197.400,00	104,35
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.461.802.436,00	815.127.007.731,00	17,72
Lain-lain PAD Yang Sah	624.691.009.909,48	610.461.346.386,00	102,33
PENDAPATAN TRANSFER	4.040.295.151.251,00	4.262.424.210.000,00	94,79
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.040.295.151.251,00	4.262.424.210.000,00	94,79
Dana Bagi Hasil	1.386.644.949.200,00	1.516.473.508.000,00	91,44
Dana Alokasi Umum	1.543.917.854.803,00	1.610.759.408.000,00	95,85
Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.453.794.879,00	137.171.782.000,00	92,19
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	983.278.552.369,00	998.019.512.000,00	98,53
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	100
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	9.077.260.000,00	9.254.860.000,00	98,08
Pendapatan Hibah	9.077.260.000,00	9.254.860.000,00	98,08
JUMLAH PENDAPATAN	8.302.215.527.202,49	9.472.594.918.254,00	87,64
BELANJA DAERAH		9.472.594.918.254,00	
BELANJA OPERASI	5.982.148.002.422,49	6.758.239.468.899,95	88,63
Belanja Pegawai	3.350.321.490.118,00	3.483.264.978.369,22	96,18
Belanja Barang dan Jasa	2.341.397.549.993,49	2.960.084.902.315,73	79,33
Belanja Bunga	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	266.227.880.278,00	283.734.876.501,00	94,19
Belanja Bantuan Sosial	24.201.082.033,00	31.154.711.714,00	77,68
BELANJA MODAL	773.293.220.325,51	1.093.268.021.309,00	70,73
Belanja Modal Tanah	87.068.400,00	87.068.400,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.632.059.030,02	360.314.130.471,00	78,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.536.920.357,49	224.206.058.301,00	73,39

URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	265.240.004.865,00	447.256.413.668,00	59,3
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.148.268.339,00	60.415.472.389,00	99,56
Belanja Modal Aset Lainnya	648.899.334,00	988.878.080,00	65,62
BELANJA TAK TERDUGA		20.136.304.247,53	
Belanja Tak Terduga		20.136.304.247,53	
BELANJA TRANSFER	1.192.214.971.359,00	1.377.510.698.097,52	86,55
Transfer - Bagi Hasil	1.192.214.971.359,00	1.377.510.698.097,52	86,55
Transfer - Bantuan Keuangan	83.760.921.800,00	223.440.425.700,00	37,49
JUMLAH BELANJA	8.031.417.115.907,00	9.472.594.918.254,00	84,87
SURPLUS/ (DEFISIT)	270.798.411.295,49		
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.062.420.907,48	21.062.420.907,48	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	249.735.990.388,01	249.735.990.388,01	100
Penggunaan SILPA	-21.131.760.549,48	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	63.339.642,00		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	21.062.420.907,48	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	249.735.990.388,01	0

Sumber Data : BPKAD Provinsi Riau pertanggal 10 Maret 2026 (LRA sesudah Reviu Inspektorat)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Data Base Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Riau memiliki Inovasi Daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1	BPBD Provinsi Riau	Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Riau (SIPAKAR)	Untuk menghasilkan Peta Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang informatif cepat dan akurat. Tidak hanya sekedar menampilkan Peta Operasi Pengendalian Karhutla, tapi dapat juga dipergunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi operasi sebelumnya sehingga operasi berikutnya dapat lebih optimal, karena histori operasi lalu tetap tersimpan dan dapat dilihat kembali.
2	Setda Provinsi Riau	Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI)	Mempermudah dan mempercepat penginputan penyusunan anjab dan ABK oleh OPD Provinsi Riau melalui sistem elektronik dan disertai petunjuk pengisian yang mudah dipahami oleh user.
3	Dinas PTPH Provinsi Riau	SIMPATI RIAU (Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau)	Aplikasi berupa sistem informasi yang memuat satu data satu peta berbasis WebGis pada pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau berupa peta spasial lahan baku sawah dan Titik Kerangka Sampel Area (KSA) BPS.
4	Dinas PTPH Provinsi Riau	GOLOK RIAU (Padi Gogo Lokal Riau)	Bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan sumberdaya genetik lokal atau kultivar spesifik lokasi, penelitian ini juga bertujuan untuk

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			menghasilkan varietas padi gogo lokal yang mempunyai keunggulan hasil seleksi dari beberapa varietas padi gogo yang ada di Provinsi Riau.
5	Dinas PTPH Provinsi Riau	Perencanaan Partisipatif Berbasis Mobile Application untuk Peningkatan Kinerja Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Riau	Inovasi pada organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan pertanian melalui sebuah konsep pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan inovasi perencanaan pembangunan pertanian dengan judul “Perencanaan Partisipatif Berbasis Mobile Application (Riau Farming) untuk Peningkatan Kinerja Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Masa Pandemi di Provinsi Riau.
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4)	P4 Riau sebagai yang pertama di Indonesia merupakan inovasi Pemprov Riau yang merespons kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik aman, nyaman, modern, dan ramah. P4 Riau merupakan tempat layanan terintegrasi pada level provinsi yang berisikan layanan dari instansi vertikal.
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Berbasis Dengan Layanan Otomatis (B'DELAU)	Aplikasi BDELAU memungkinkan pengguna untuk memesan tempat dalam antrian tanpa harus datang langsung ke lokasi fisik. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan pengguna dalam menunggu layanan, karena mereka bisa datang tepat saat giliran mereka tiba.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Riau Downstream Industry and Green Investment Proposal Project Challenge	Tantangan Proyek Industri Hilir dan Investasi Hijau Riau adalah inisiatif dari DPMPTSP Riau dan Bank Indonesia untuk mempercepat hilirisasi industri yang berkelanjutan. Inisiatif ini mendorong investasi di bidang energi terbarukan dan teknologi hijau, dan baru-baru ini memberikan penghargaan kepada perusahaan seperti Sambu Group dan PTPN IV atas proposal yang menggabungkan nilai ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	JELITA RIAU (Jendela Literasi Dan Inspirasi Kita)	JELITA Riau mensosialisasikan dan membudayakan gemar membaca serta membentuk masyarakat literat, informatif, mandiri dan sejahtera dengan packaging promosi yang atraktif dan mendorong generasi muda Riau peduli akan kemajuan literasi khususnya di wilayah Riau dengan cara promosi Perpustakaan yang menarik, simpel, mudah dipahami dan disenangi seluruh lapisan masyarakat yaitu video berdurasi singkat
10	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau	MIRAI (Mobile Information System of RSUD Arifin Achmad) Versi 2.0	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pendaftaran kunjungan pasien rawat jalan RSUD Arifin Achmad melalui penggunaan smartphone Android, sehingga dapat mengurangi antrian pendaftaran pasien rawat jalan di Loker Pendaftaran dan mempercepat dan mempersingkat alur proses pendaftaran pasien rawat jalan.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
11	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau	RESIKAA (Rekam Medis Elektronik Arifin Achmad)	Dapat mempercepat mulainya pelayanan pasien di poli rawat jalan RSUD Arifin Achmad karena telah memangkas waktu proses pencarian map status rekam medis pasien oleh petugas rekam medis.
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Riau Science Center (RSC)	Keberadaan Riau Science Center dapat mempermudah Pelajar , mahasiswa atau masyarakat umum dalam menerapkan dan mempraktikkan langsung alat – alat peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah diajarkan di sekolah dalam bentuk rekreasi edukatif, yaitu bermain sambil belajar.
13	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Klinik Inovasi Daerah Zona Pengembangan Inovasi Riau (Zapin Riau)	Teradministrasinya inovasi daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kepuasan aparatur dan masyarakat selaku penerima manfaat.
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	E-jurnal IPTEKIN	E-jurnal IPTEKIN bertujuan untuk mempublikasikan jurnal yang memuat naskah/artikel hasil penelitian dan pengembangan, hasil analisis ilmiah data primer dan data sekunder, kajian (review) tentang topik terkini, analisis kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam setahun.
15	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Reaktifasi Sumur Minyak Idle Nasional dengan Teknologi Mix Biosolvent	Upaya optimalisasi terhadap sumur minyak di Provinsi Riau yang aktif dan khususnya sumur- sumur minyak yang tidak aktif (idle well) untuk potensi di WK Rokan saja yaitu sebesar 601

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			sumur serta banyak lagi potensi sumur minyak yang tidak aktif berada pada perusahaan migas di Riau yang terus gencar dilakukan dengan berbagai inovasi teknologi. Kawasan Riau Science Techno Park merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Riset Inovasi Daerah yang telah memiliki beberapa hasil riset bersama perusahaan pemula berbasis teknologi (start up) di bidang reaktivasi sumur Idle dengan stimulasi injeksi produk chemical inovasi Riau Mix Biosolvent Ethanol sebagai amanah dari Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2017 dimana memerlukan dukungan terhadap mengatasi permasalahan tersebut.
16	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sentra Kekayaan Intelektual Provinsi Riau	Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.3096/VI/2024, berfungsi sebagai pusat konsultasi, asistensi, dan pendampingan pendaftaran HKI (hak cipta, paten, merek) bagi masyarakat, dosen, dan peneliti. Didorong oleh Kanwil Kemenkumham Riau, pusat ini juga aktif diperkuat di perguruan tinggi untuk mendukung komersialisasi paten.
17	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Klinik Inovasi Daerah Zona Pengembangan Inovasi Riau (Zapin Riau)	Klinik Inovasi Daerah Zona Pengembangan Inovasi Riau (Zapin Riau) adalah inisiatif Bappedalitbang Provinsi Riau untuk memperkuat ekosistem inovasi, memfasilitasi pelaporan, dan evaluasi inovasi

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini menindaklanjuti penilaian indeks inovasi daerah dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan Innovative Government Award (IGA).
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Provinsi Riau Manajemen Kemantapan (SIJARI MANTAP)	Bertujuan untuk layanan pelaporan berbasis elektronik (online) terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh masyarakat Provinsi Riau untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi jalan dan jembatan sehingga dapat dengan segera ditangani oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SIBERAKSI : Sistem Inseminasi Buatan Berbasis Aksi Kolaboratif Strategis dan Inovatif	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman, Pakan Ternak , Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
20	Dinas Pendidikan Prov. Riau	Sistem Informasi Pengetasan Anak Tidak Sekolah (SIPANTAS)	Tujuan Inovasi Sistem Informasi Pengentasan Anak Tidak Sekolah (SIPANTAS) ini untuk membantu daerah dalam percepatan pendataan dan fasilitasi pembinaan anak tidak sekolah di Provinsi Riau.
21	Dinas Pendidikan Prov. Riau	Sistem Aplikasi Bantuan Siswa Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (BSM/KAT)	Sistem Aplikasi Bantuan Siswa Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (BSM/KAT) adalah inovasi digital, khususnya di Provinsi Riau, yang dirancang untuk mendata dan menyalurkan bantuan finansial secara efisien kepada siswa kurang mampu dan komunitas adat. Aplikasi ini bertujuan mencegah putus sekolah,

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			meningkatkan akses pendidikan, dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi siswa SMA/SMK/SLB.
22	Inspektorat Provinsi Riau	Sistem Informasi Digital Continuous Reviu Continuous Monitoring (SIGIT-CRCM)	Dalam pelaksanaannya, reviu LPPD Provinsi Riau yang sudah berjalan sebelumnya masih bersifat manual, baik dari penginputan data capaian kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, maupun verifikasi dan validasi serta reviu pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Sehingga pelaksanaan reviu LPPD Provinsi Riau belum dapat terselenggara optimal.
23	Dinas Perkebunan	SI TUAH SAKTI (Sistem Penetapan Harga Tandan Buah Sawit untuk Petani)	SI TUAH SAKTI (Sistem Penetapan Harga Tandan Buah Segar untuk Petani) adalah inovasi sistem atau kebijakan yang dirancang untuk mengatur mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit agar lebih wajar, transparan, dan melindungi petani plasma maupun mandiri, seringkali mengacu pada pedoman Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018.
24	Dinas Kesehatan Prov. Riau	Mall Vaksin	Agar masyarakat Provinsi Riau mendapat akses pelayanan vaksin covid-19 selama 24 jam
25	Dinas Kesehatan Prov. Riau	Ring Jamkes	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk se Provinsi Riau terutama bagi masyarakat miskin dan tidak

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			mampu yang belum terdaftar sebagai PBI APBN dengan Budget Sharing (55 % dibebankan dari APBD Provinsi Riau dan 45 % dari APBD dari Kabupaten/ Kota)
26	Bapenda	Samsat Tanjak (Transaksi Antar Jemput Antar Kampong)	Samsat Tanjak (Transaksi Antar Jemput Antar Kampong) adalah inovasi layanan Bapenda Riau untuk jemput bola pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan langsung ke masyarakat, biasanya berlokasi di kecamatan/desa terpencil, pusat keramaian, atau perusahaan. Layanan ini mempermudah warga yang jauh dari kantor UPT Samsat untuk taat pajak.
27	BPSDM	SILAU (Sistem Informasi Pelatihan Terpadu)	SILAU (Sistem Informasi Pelatihan Terpadu) adalah platform Learning Management System (LMS) yang dirancang untuk mengelola materi pelatihan secara sistematis, memudahkan akses materi, serta memantau progres peserta. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta menyediakan fitur interaktif seperti kuis dan video.
28	Dispora Provinsi Riau	SIRAGA "Sistem Informasi Prasarana Olahraga"	Tersedianya sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dalam sebuah sistem/ aplikasi, Peningkatan pendapatan asli daerah dan tersedianya informasi terkait prasarana olahraga.